BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Sumber daya yang besar juga membutuhkan banyak pekerjaan. Di sisi lain, sebagai negara berkembang, perkembangan industrinya masih rendah dibandingkan dengan negara maju. Ini menciptakan ketidakseimbangan antara pencari kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Ketimpangan ini berdampak pada pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran terjadi karena banyaknya kesempatan kerja tidak yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan tenaga kerja baru yang dihasilkan perguruan tinggi (Leonardus Saiman, 2012:22).

Hal ini merupakan ancaman atau bahaya yang sangat serius untuk segera ditanggulangi serta ledakan pengangguran yang luar biasa ini pasti akan memberikan dampak yang sangat mencemaskan sekaligus mengkhawatirkan bagi keutuhan dan keberlangsungan Negara ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023 tentang jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,45 %, sedangkan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Sumatera Utara pada Februari 2023 masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 413.000 jiwa dan TPT di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 mencapai 1.03 %. Angka pengangguran yang tinggi berakibat pada masalah sosial ekonomi. Oleh sebab itu salah satu upaya yang untuk mengurangi angka pengangguran perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan.

Menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi, tantangan utama ke depan adalah mengembangkan sumber daya manusia. Perkembangan ini terjadi di semua sektor, baik sektor industri maupun jasa bergantung pada sumber daya manusia. Diperlukan acuan standar untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memadai menjadi tenaga kerja yang profesional. Untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi program pendidikan dan pelatihan kerja nasional diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang harus dan perlu dilakukan untuk menghadapi tuntutan tugas dan tantangan di masa depan, pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Upaya dalam pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan yang tidak hanya berfokus pada intelektual tetapi harus mampu meningkatkan kualitas diri sehingga masyarakat mampu mengembangkan potensi dirinya.

Dalam situasi ekonomi yang sulit, sikap kewirausahaan adalah sesuatu yang dibutuhkan seseorang. Kewirausahaan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk membuka usaha sendiri, tetapi dapat diartikan sebagai kesempatan untuk mengubah pemikiran, mentalitas, dan perubahan sosial budaya. Wirausaha adalah sikap dan mental jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, kreatif, inisiatif dan bersahaja dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya (Amin, 2008: 33).

Berwirausaha akan memberikan peluang untuk diri sendiri dalam mencapai kesuksesan. Dari segi sosial akan memberikan peluang kerja bagi orang lain, masyarakat dan lingkungan. Selain itu, berdasarkan penelitian “ Untuk menjadi

sebah negara yang sukses dibutuhkan minimal 2% wirausaha dari jumlah penduduk di negara tersebut, sedangkan di indonesia jumlah wirausahawan sebanyak 1,6 % , masih kalah dengan Singapura dan Malaysia yang menduduki angka 7% dan 5%” (Alia R. F, 2017:11). Wirausaha adalah salah satu faktor pendukung yang menentukan maju mundurnya perekonomian, karena bidang wirausaha memiliki kebebasan untuk mandiri dan berkarya.

Sikap wirausaha merupakan gambaran kepribadian individu yang lahir melalui pemikiran nyata dan gerakan nyata tentang kewirausahaan. Sikap ini merupakan sikap positif yang memiliki kemauan dan keyakinan kuat terhadap kekuatan diri, bertanggung jawab dan berpikir positif, rajin dan gigih bekerja keras, memiliki ketahanan fisik dan mental, serta memiliki cara berpikir kreatif, konstruktif, inovatif, bergerak ke masa depan, dan berani mengambil risiko. Sikap wirausaha perlu dimiliki oleh warga belajar sebagai bekal hidup untuk dapat lebih inovatif, kreatif dan mandiri sehingga di masa yang datang tidak lagi menjadi pekerja atau pegawai kantoran karena telah dipersiapkan agar mampu bekerja secara mandiri atau wirausaha.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa “jalur pendidikan terdiri dari 3 yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi satu sama lain”. Pendidikan Nonformal hadir sebagai sistem pendidikan nasional yang memiliki keleluasaan lebih besar dibanding pendidikan formal yang secara cepat disesuaikan untuk kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan potensinya. Berdasarkan pada Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Pasal 100 yang berbunyi “Penyelenggaraan satuan pendidikan

nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi satuan pendidikan : a) lembaga kursus dan lembaga pelatihan; b) kelompok belajar; c) pusat kegiatan belajar masyarakat; d) majelis taklim; dan e. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal”.

Pendidikan Nonformal sebagai jalur pendidikan mengupayakan pembinaan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi gerakan dalam menyadarkan masyarakat agar terus belajar dalam mengatasi tantangan kehidupan. Lembaga yang memberikan pendidikan bagi masyarakat datang dari kalangan bisnis dan industri , dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lainnya. Pendidikan berbasis kompetensi muncul didorong akan kebutuhan belajar keterampilan-keterampilan dan pengetahuan baru.

Dalam masyarakat, pelatihan diberikan sebagai upaya membantu dalam meningkatkan kemampuan keterampilan, produktivitas dan daya saing masyarakat dalam merebut peluang usaha untuk menghadapi tuntutan maupun perubahan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pelatihan menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha mandiri maupun usaha kelompok.

Pelatihan bertujuan untuk: 1) mempersiapkan dan membantu peserta/sasaran dengan memberikan kesempatan agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan rohani, jasmani dan sosialnya. 2) menumbuhkan dan meningkatkan keterampilan kerja dalam rangka memberikan ilmu bekal kehidupan dan dapat terlepas dari pengangguran dan kemiskinan. Program pelatihan merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 5 tentang sistem pendidikan nasional yang juga menyatakan bahwa Kursus dan

Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk pengembangan diri, pengembangan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dan pelatihan bukan saja hanya memberikan keterampilan untuk mencari pekerjaan tetapi diharapkan mampu meningkatkan sikap berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah lembaga pendidikan non-formal yang sudah memiliki izin khusus dan telah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah pusat maupun daerah, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sumber daya manusia dengan jangka waktu singkat sesuai permintaan, serta juga bertujuan untuk memberikan dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan bakat seseorang agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam suatu pekerjaan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan keterampilan yang dimilikinya. Terjadinya kegiatan pelatihan apabila individu menyadari perlunya mengembangkan potensi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepuasan dalam hidupnya. Dengan adanya pelaksanaan pelatihan ini diharapkan masyarakat yang belum memiliki keterampilan akan memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal dirinya.

LKP Rade Kursus Menjahit merupakan satu-satunya lembaga kursus dan pelatihan yang ada di Desa Panieran, Kabupaten Tapanuli Utara yang menyediakan kursus dan pelatihan tata busana. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Rade Kursus Menjahit berdiri sejak tahun 2021. Pelatihan menjahit merupakan salah satu pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi masyarakat yang berminat dibidang tata busana. Keterampilan

yang didapat warga belajar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat juga menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup.

Lembaga Kursus dan Pelatihan Rade Kursus Menjahit menyelenggarakan program dibidang pelatihan tata busana, sejak berdiri di tahun 2021 sampai pada tahun 2024 telah menghasilkan 2 angkatan kelulusan, yaitu lulusan pertama pada tahun 2022 diikuti oleh 15 peserta dan lulusan kedua pada tahun 2023 diikuti oleh 15 peserta. Tujuan warga belajar mengikuti pelatihan menjahit ini adalah agar dapat memiliki dan mengembangkan keterampilan menjahit yang nantinya setelah lulus dari pelatihan menjahit, keterampilan yang telah didapatkan bisa digunakan untuk menjadi lebih mandiri.

Pelatihan menjahit merupakan salah satu yang mendorong peserta pelatihan untuk memiliki atau mengembangkan potensinya di bidang tata busana. Namun, dalam pelatihan menjahit di LKP Rade Kursus Menjahit pengelola hanya memantau sampai uji kompetensi, dampak untuk berwirausaha pada peserta setelah selesai dari pelatihan itu sendiri tidak terlalu diperhatikan. Sedangkan suatu pelatihan dikategorikan berhasil apabila mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan pelatihan di LKP Rade yaitu peserta yang telah lulus diharapkan dapat membuka wirausaha maupun dapat bekerja pada orang yang memiliki wirausaha. Tujuan dipandang sebagai tolak ukur yang akurat untuk pencapaian hasil suatu pelatihan.

Berdasarkan dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Dampak Pelatihan Menjahit Terhadap Peningkatan Sikap Wirausaha Warga Belajar Di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Rade Kursus Menjahit Desa Paniaran Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks ini, masalah-masalah berikut dapat dikenali:

1. Jumlah pengangguran yang meningkat disebabkan oleh tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja.
2. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menunjukkan perlunya pengembangan potensi dan kemampuan di LKP Rade Kursus Menjahit.
3. Dampak pelatihan menjahit terhadap peningkatan sikap wirausaha bagi lulusan peserta pelatihan di LKP Rade kursus Menjahit
4. Sikap wirausaha pada warga belajar masih tergolong rendah. Terbukti warga belajar yang memulai dan mengelola usaha sendiri masih terbatas, karena mereka masih memikirkan mencari pekerjaan daripada menciptakan lapangan pekerjaan.

1.3 Batasan Masalah

Tidak semua permasalahan yang tercantum akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti membatasi variabel yang diteliti. Oleh sebab itu batasan masalah dalam penelitian ini ialah Dampak Pelatihan Menjahit terhadap Peningkatan Sikap Wirausaha Warga Belajar di LKP Rade Kursus Menjahit, Desa Paniaran, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana pelatihan menjahit yang dilaksanakan di LKP Rade Desa Paniaran?

2. Bagaimana peningkatan sikap wirausaha pada warga belajar di LKP Rade Desa Paniaran?
3. Seberapa Besar Dampak Pelatihan Menjahit Terhadap Peningkatan Sikap Wirausaha Warga Belajar di LKP Rade Kursus menjahit?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana pelatihan menjahit yang dilaksanakan di LKP Rade Desa Paniaran
2. Mengetahui peningkatan sikap wirausaha pada warga belajar di LKP Rade Desa Paniaran
3. Mengetahui Seberapa Besar Dampak Pelatihan Menjahit Terhadap Peningkatan Sikap Wirausaha Warga Belajar di LKP Rade Kursus menjahit

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memperluas pemahaman pembaca dan peneliti mengenai dampak pelatihan menjahit terhadap peningkatan sikap wirausaha warga belajar di Kursus Menjahit LKP Rade.

1.6.2 Manfaat Praktis :

1. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan tentang pemberdayaan warga belajar melalui pelatihan menjahit
2. Bagi mahasiswa bisa dijadikan referensi dan pengetahuan tentang pemberdayaan warga belajar melalui pelatihan menjahit
3. Bagi LKP dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengadakan pelatihan yang lebih baik.